

**STUDI KOMPARATIF PERATURAN PENGANGKATAN ANAK
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007
DI INDONESIA DAN ADOPTION ACT 1952 DI MALAYSIA**

Oleh

Ida Ayu Putu Gita Prayascita, NIM 2214101158

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pengangkatan anak di Indonesia dan Malaysia yang mencakup persyaratan, prosedur pelaksanaan, serta lembaga yang berwenang dalam mengesahkan pengangkatan anak, sekaligus mengkaji dan menjelaskan konsekuensi yuridis administratif yang timbul apabila pengangkatan anak dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku di kedua negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia sama-sama mendasarkan pengangkatan anak pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, namun Indonesia masih menghadapi kelemahan normatif dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 khususnya dalam perumusan indikator kesehatan dan pendidikan dalam prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sebaliknya, Malaysia memiliki pengaturan yang lebih rinci, terstruktur, serta didukung oleh mekanisme pengawasan pra dan pasca-adopsi yang kuat meliputi: *Adoption Act* 1952, *Registration of Adoptions Act* 1952, *Child Act* 2001. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pembaruan regulasi pengangkatan anak di Indonesia agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan anak. Disarankan agar pemerintah merumuskan kepentingan terbaik anak serta memperkuat pengawasan dan kelembagaan dalam praktik pengangkatan anak.

Kata Kunci: Indonesia, Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Malaysia, Pengangkatan Anak, Studi Komparatif.

**STUDI KOMPARATIF PERATURAN PENGANGKATAN ANAK
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007
DI INDONESIA DAN ADOPTION ACT 1952 DI MALAYSIA**

By

Ida Ayu Putu Gita Prayascita, NIM 2214101158

Legal Studies Program

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze the legal arrangements of child adoption in Indonesia and Malaysia which include the requirements, implementation procedures, and institutions authorized in legalizing child adoption, as well as examining and explaining the administrative legal consequences that arise if the adoption of a child is not in accordance with the legal requirements and provisions applicable in both countries. The research method used is normative legal research with a legislative approach and legal comparison, through a literature study of laws and regulations, legal doctrines, and related literature. The data collection technique was carried out by searching for relevant primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that Indonesia and Malaysia both base child adoption on the principle of the best interests of the child, but Indonesia still faces normative weaknesses in Article 2 of Government Regulation Number 54 of 2007, especially in the formulation of health and education indicators in the principle of the best interests of the child. In contrast, Malaysia has more detailed, structured arrangements and is supported by strong pre- and post-adoption supervision mechanisms including: Adoption Act 1952, Registration of Adoptions Act 1952, Child Act 2001. This study concludes that it is necessary to update the regulation of child adoption in Indonesia in order to create legal certainty and child protection. It is recommended that the government formulate the best interests of children and strengthen supervision and institutions in the practice of child adoption.

Keywords: Indonesia, best interests for children, Malaysia, child adoption, comparative study.